

**ANALISIS HASIL PEMILIHAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN
2018 DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
EFRI NOVIANTO¹**

Abstract

This research is aimed to analyze the result of East Kalimantan governor election in Kutai Kartanegara Regency. This research uses descriptive survey approach. Data collection was done by face-to-face directly using the questionnaire on 28 May until 7 June 2018 in 6 subdistricts namely Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Loa Janan and Kota Bangun with 117 respondents. From the result of the research, it can be concluded that Isran Noor-Hadi Mulyadi and Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat who is the son of the region succeeded in maximizing tribal identity, so that they won the majority of voters from their respective tribes. The victory of Isran Noor-Hadi Mulyadi pair is due to the capability of the party machine in the winner, especially the PKS machine which is a representation of Hadi Mulyadi. It is also due to the solidarity of the couple's voters unaffected by money politics.

Keywords: *Pilgub, Tribal Identity, Party Machine, Solidity of Voters*

I. PENDAHULUAN

Salah satu indikator demokrasi adalah adanya pergantian kepemimpinan secara reguler dimana rakyatlah yang menentukan atau memilih pemimpin tersebut melalui proses pemilihan umum yang bebas (Gaffar, 2004).

Pemilihan umum baik pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah di Indonesia dilakukan secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk lebih menegakan kedaulatan rakyat yang merupakan salah satu prinsip Negara demokrasi. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat (4), dimana disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diubah untuk yang terakhir kalinya melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Tanggal 27 juni 2018 yang lalu, Propinsi Kalimantan Timur beserta 17 propinsi, 115 kabupaten dan 39 kota di Indonesia melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak.

¹ Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kutai Kartanegara. Email : efri_85@yahoo.co.id

Hasilnya sebagaimana ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Timur menempatkan pasangan nomor urut 3 Isran Noor-Hadi Mulyadi yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN dan PKS sebagai pemenang dengan raihan suara sebesar 417.711 (31,33%), di ikuti oleh pasangan nomor urut 4 Rusmadi-Syafaruddin yang diusung oleh PDIP dan Partai Hanura sebesar 324.226 suara (24,32%), pasangan nomor urut 2 Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB dan PPP sebesar 302.987 suara (22,73%) dan pasangan nomor urut 1 Sofian Hasdam-Rizal Effendi yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem sebesar 288.166 suara (21,62%). Hasil ini tidak jauh berbeda dengan hasil hitung cepat (*quick count*) yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei.

Yang menarik kemudian untuk dianalisis adalah bagaimana perilaku pemilih dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana diketahui, pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi juga telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan raihan suara sebesar 96.045 suara (35,37%), di ikuti pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat sebesar 59.736 suara (22,00%), pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi sebesar 58.007 suara (21,36%) dan pasangan Rusmadi-Syafaruddin sebesar 57.729 suara (21,26%). Hasil ini perolehan suara masing-masing pasangan calon mengalami kenaikan dari hasil survei yang dilakukan oleh peneliti sebulan sebelum pencoblosan dilakukan, dimana menempatkan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 32,48% di ikuti oleh pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat sebesar 21,37%, kemudian pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi sebesar 12,82% dan pasangan Rusmadi-Safaruddin 10,26%. Sedangkan responden yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan sebesar 23,08 %. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hasil pemilihan gubernur Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan hasil survei yang peneliti lakukan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan survei deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung menggunakan kuisioner pada tanggal 28 Mei sampai dengan 7 Juni 2018 di 6 Kecamatan yaitu Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Loa Kulu, Loa Janan dan Kota Bangun. Responden ditetapkan sebanyak 117 orang yang dipilih secara acak dengan metode *accidental sampling* dengan usia minimal 17 Tahun. Alat analisis yang digunakan adalah tabulasi silang (*crosstab*).

Tabel 2.1.
Demografi Responden

KATEGORI	SAMPEL	KATEGORI	SAMPEL
JENIS KELAMIN		SUKU	
Laki-Laki	46,20%	Jawa	38,50%
Perempuan	53,80%	Bugis	5,10%
AGAMA		Banjar	7,70%
Islam	86,30%	Kutai	36,80%
Protestan	5,10%	Dayak	2,60%
Katolik	1,70%	Lainnya	9,40%
Lainnya	6,90%		
JENIS PEKERJAAN		PILIHAN PARTAI	
PNS/ Pemerintah	12,82%	Golkar	41,88%
Karyawan	20,51%	PDIP	9,40%
Petani	10,26%	PAN	2,56%
Pedagang	30,77%	Gerindra	11,97%
Buruh	1,71%	PKS	1,71%
Tukang	0,85%	PPP	0,85%
Pengusaha	4,27%	Demokrat	1,71%
Lainnya	18,80%	Lainnya	29,91%

Sumber: diolah dari hasil survei

III. LANDASAN TEORI

3.1. Demokrasi

Salah satu bentuk atau sistem pemerintahan adalah demokrasi, dimana sering dipahami sebagai pemerintahan dari rakyat atau kedaulatan rakyat. Secara bahasa

demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* yang berarti kekuasaan rakyat. Dalam demokrasi, setiap warga negara atau rakyat memiliki hak yang sama dan setara dalam pengambilan keputusan serta berpartisipasi secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan kebijakan.

Soemantri (1971) mendefinisikan demokrasi dalam dua hal yaitu dalam arti formal yang dimaknai sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti DPR dan MPR dan sebagai pandangan atau falsafah hidup.

Selanjutnya Indikator dari negara demokrasi menurut Gaffar (2004) adalah:

- a. adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas jabatan atau kebijakan yang dirumuskan;
- b. adanya rotasi kekuasaan atau pergantian kekuasaan secara regular, teratur dan damai melalui proses pemilihan yang terbuka;
- c. adanya rekrutmen politik yang terbuka untuk memastikan rotasi kekuasaan dapat terjadi secara adil;
- d. adanya pemilihan umum sebagai instrumen demokrasi untuk rotasi kekuasaan; dan
- e. adanya kebebasan warga masyarakat untuk menggunakan hak-hak dasar (berpartisipasi) dalam menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul.

3.2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan tersebut salah satunya adalah memberikan suara dalam pemilihan umum (Novianto, 2017).

McClosky (1972) memahami partisipasi politik sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan menurut Huntington dan Nelson (1977) partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.

Konsep partisipasi politik berasal dari paham kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan

masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk kepemimpinan dalam sebuah negara. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin baik dimana hal ini menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Hal itu juga menunjukkan legitimasi kepemimpinan semakin kuat, sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga apatis. Akan tetapi rendahnya partisipasi tidak mempengaruhi legalitas keterpilihan seorang pemimpin.

3.2. Apathi

Kebalikan dari partisipasi adalah apathy atau apatis yaitu sikap yang ditunjukkan dalam bentuk keengganan dalam berpartisipasi atau ikut pemilihan, acuh tak acuh, tidak tertarik, atau kurang paham mengenai masalah politik. Namun demikian tidak semua ahli menganggap apathi sebagai masalah yang perlu dirisaukan.

Mc Closky (1972) termasuk yang berpandangan demikian, ia mengatakan bahwa sikap apathi dapat diartikan sebagai hal yang positif karena memberi fleksibilitas kepada sistem politik, dibanding dengan masyarakat yang mengalami partisipasi berlebih-lebihan, sehingga terjadi konflik, bergabung dalam kubu-kubu yang saling bertikai sehingga memunculkan instabilitas sebagai manifestasi ketidakpuasan. Sebaliknya ada kemungkinan bahwa orang itu tidak ikut memilih karena berpendapat bahwa keadaan tidak terlalu buruk dan bahwa siapa-pun yang terpilih tidak akan mengubah keadaan. Apathi dalam pandangan Mc Closky tidak menunjuk pada rasa kecewa atau frustrasi, tetapi malahan sebagai manifestasi rasa puas dan kepercayaan pada sistem politik yang ada.

3.3. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih dapat diartikan sebagai proses pembuatan dan pelaksanaan proses politik. Kegiatan ini meliputi antara lembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok dan individu-individu di dalam masyarakat dalam rangka pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan politik. Kegiatan yang dilakukan itu pada dasarnya dibagi ke dalam dua bagian yakni fungsi-fungsi politik yang dipegang oleh masyarakat. Namun fungsi pemerintahan, maupun fungsi politik, biasanya dilaksanakan oleh struktur tersendiri, yaitu

suprastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik pemerintahan dan infrastruktur politik bagi fungsi-fungsi politik masyarakat (Surbakti, 2010).

Gaffar (1992) dalam menganalisis *voting behavior* dan untuk menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilih dalam menjatuhkan pilihannya, dikenal dua macam pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan sosiologis memandang masyarakat sebagai sesuatu yang bersifat hirarkis terutama berdasarkan status, karena masyarakat secara keseluruhan merupakan kelompok orang yang mempunyai kesadaran status yang kuat. Mereka percaya bahwa masyarakat sudah tertata sedemikian rupa sesuai dengan latar belakang dan karakteristik sosialnya, maka memahami karakteristik sosial tersebut merupakan sesuatu yang penting dalam memahami perilaku politik individu. Perilaku pemilih dari pendekatan sosiologis tersebut dipengaruhi oleh indikator: 1. Pendidikan 2. Jabatan atau pekerjaan 3. Jenis kelamin dan usia.

Menurut Seymour M. Lipset (Alwis dalam Novianto 2017), karakteristik sosiologis pemilih dipengaruhi oleh beberapa kategori, yaitu pendapatan, pendidikan, pekerjaan, ras, jenis kelamin, umur, tempat tinggal, situasi, status dan organisasi. Menurut hasil penelitian yang pernah mereka lakukan, bahwa status sosial ekonomi (pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan kelas sosial pemilih), tempat tinggal (rural atau urban) memiliki hubungan yang sangat kuat dengan perilaku pemilih.

Pendekatan psikologis lebih menekankan bahwa perilaku memilih seseorang atau sekelompok orang dipengaruhi oleh aspek sosio-psikologis yang menentukan tindakan memilih. Pendekatan Psikologi ini membangun asumsi bahwa penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis. Penentuan untuk memilih atau memihak kepada satu kekuatan politik, dipandang sebagai produk dari sikap dan disposisi psikis para pemilih. Pendekatan psikologis ini percaya bahwa tingkah laku memilih dari seseorang dapat dideteksi dengan dua konsep. Pertama, disebut *political involvement*, yakni perasaan penting atau tidak untuk terlibat ke dalam isu-isu politik yang bersifat umum. Kedua, disebut *party identification*, yakni preferensi (perasaan suka atau tidak suka) dari seseorang terhadap satu partai atau kelompok politik tertentu. Pada tahap awal, seseorang

harus merasa yakin bahwa kehadirannya atau keikutsertaannya dalam proses politik memang sangat diperlukan. Hanya dengan memiliki perasaan seperti ini, maka seseorang akan memiliki kepedulian politik yang tinggi. Dia akan termotivasi untuk memperhatikan serta memberikan respons terhadap perkembangan isu-isu politik yang ada.

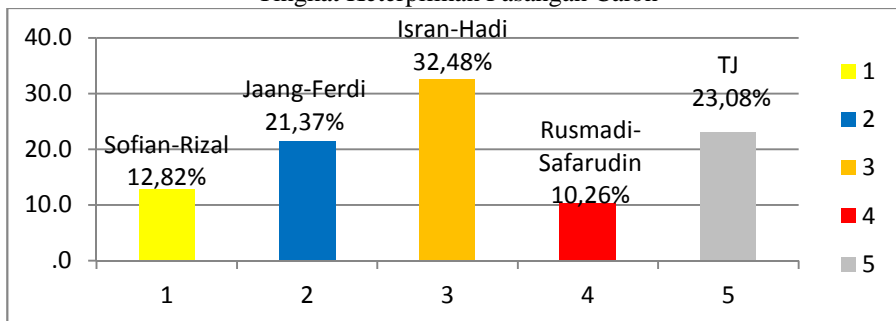
IV. HASIL PENELITIAN

Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018, diikuti oleh 4 pasangan calon yaitu:

1. dr. H. Andi Sofian Hasdam, Sp.S dan H.M. Rizal Effendi, SE yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Nasdem;
2. H. Syaharie Jaang, SH.,M.Si dan H. Awang Ferdian Hidayat, SE.,MM yang diusung oleh Partai Demokrat, PKB dan PPP;
3. Dr. H. Isran Noor dan H. Hadi Mulyadi, S.Si.,M.Si yang diusung oleh Partai Gerindra, PAN dan PKS; dan
4. Ir. H. Rusmadi, MS.,Ph.D dan H. Safaruddin yang diusung oleh PDIP dan Partai Hanura.

Berdasarkan temuan survei, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi sebagai peraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebesar 32,48 % di ikuti oleh pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat sebesar 21,37 %, kemudian pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi sebesar 12,82 % dan pasangan Rusmadi-Safaruddin 10,26 %. Sedangkan responden yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan sebesar 23,08 %.

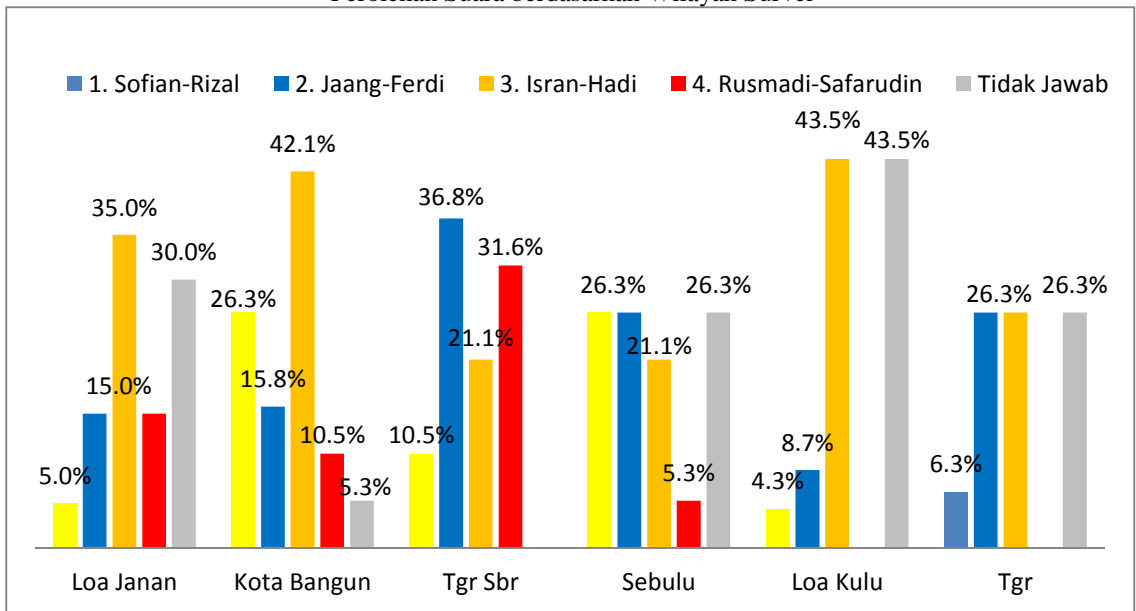
Diagram 1.
Tingkat Keterpilihan Pasangan Calon



Sumber: diolah dari hasil survei

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi meraih suara terbanyak di 3 wilayah survei yaitu Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Kota Bangun, sedangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat meraih suara terbanyak di Kecamatan Tenggarong Seberang.

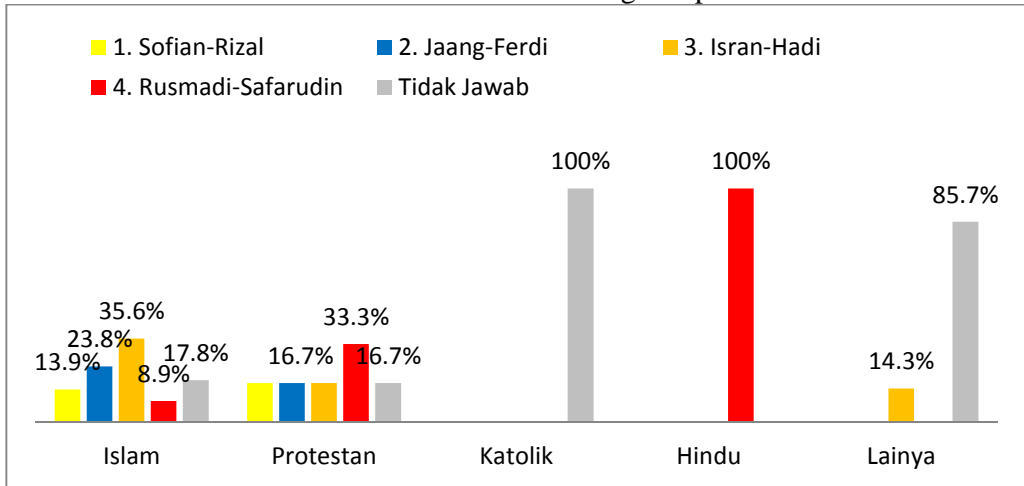
Diagram 2.
Perolehan Suara berdasarkan Wilayah Survei



Sumber: diolah dari hasil survei

Berdasarkan agama pemilih, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor- Hadi Mulyadi berhasil memperoleh dukungan pemilih Islam yang merupakan mayoritas di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 35,6 %, ikuti oleh pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat sebesar 23,8 %, kemudian pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi sebesar 13,9 % dan pasangan Rusmadi-Safaruddin 8,9 %.

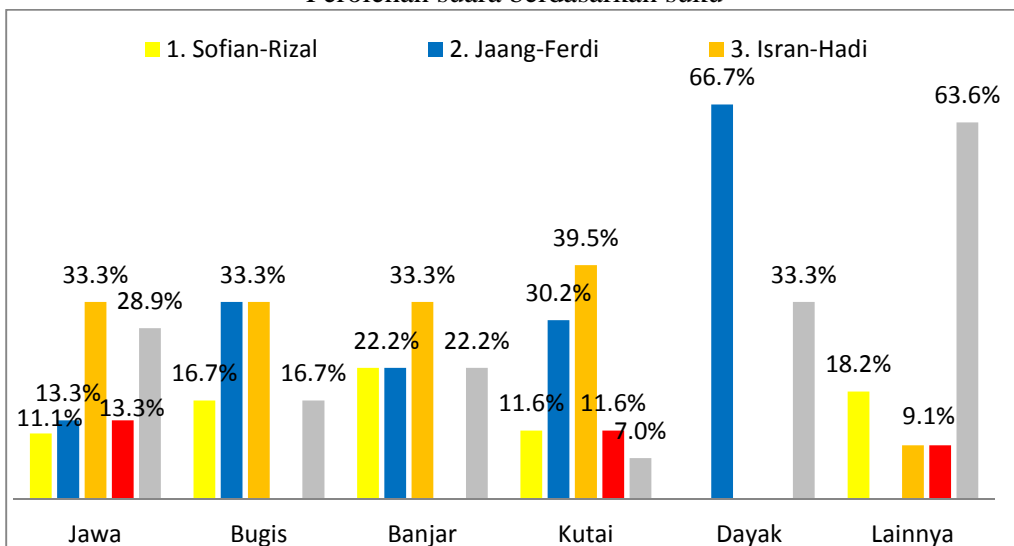
Diagram 3.
Perolehan suara berdasarkan agama pemilih



Sumber: diolah dari hasil survei

Berdasarkan suku, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi berhasil memperoleh dukungan pemilih berasal dari suku Kutai sebesar 39,5 %, suku Jawa, Bugis dan Banjar masing-masing sebesar 33,3%. Sedangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat di dukung oleh mayoritas suku Dayak sebesar 66,7%, Bugis sebesar 33,3% dan Kutai sebesar 30,2%.

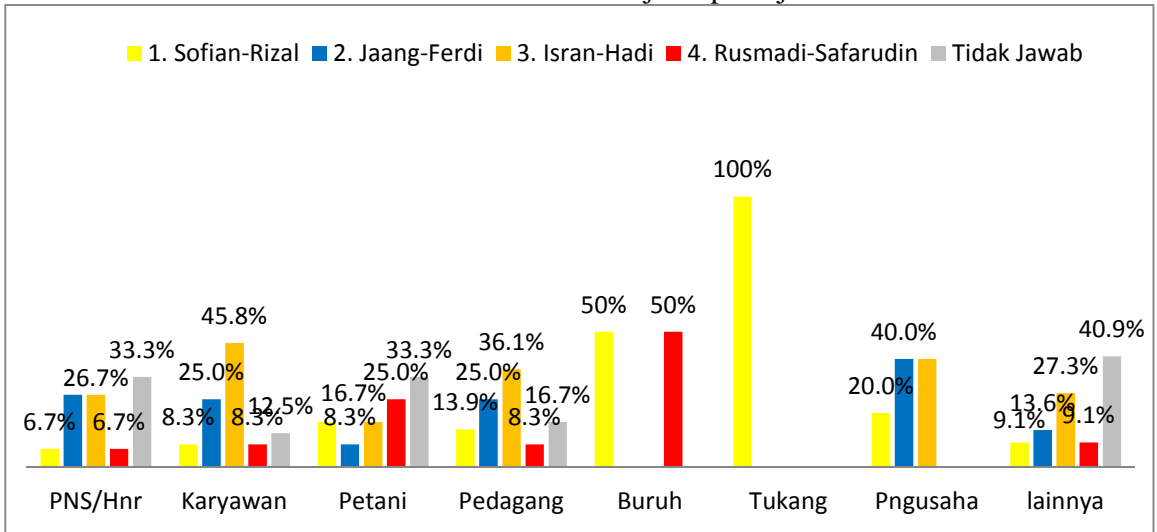
Diagram 4.
Perolehan suara berdasarkan suku



Sumber: diolah dari hasil survei

Berdasarkan jenis pekerjaan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi berhasil memperoleh dukungan pemilih yang berprofesi sebagai pedagang sebesar 45,8%, pengusaha sebesar 40 %, pedagang sebesar 36,1%, PNS sebesar 26,7% dan petani sebesar 16,7%.

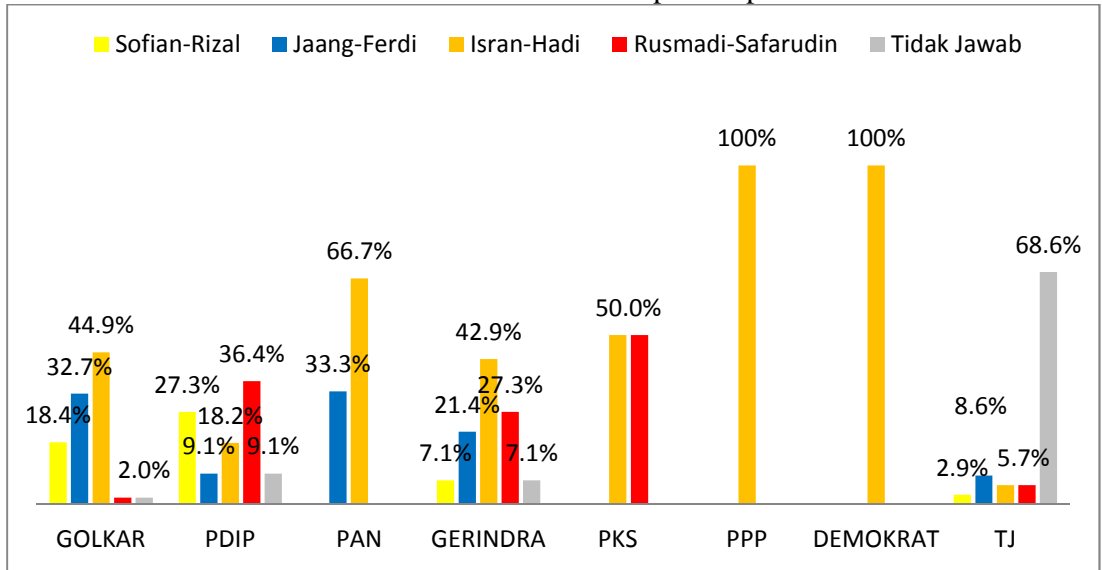
Diagram 5.
Peroleh suara berdasarkan jenis pekerjaan



Sumber: diolah dari hasil survei

Berdasarkan pilihan partai, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi berhasil memperoleh dukungan pemilih partai Golkar yang merupakan peraih suara mayoritas di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 44,9%, PAN sebesar 66,7% PKS sebesar 50 % dan Gerindra sebesar 42,9%. Sedangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Rusmadi dan Safaruddin memperoleh dukungan pemilih PDIP sebesar 36,4%.

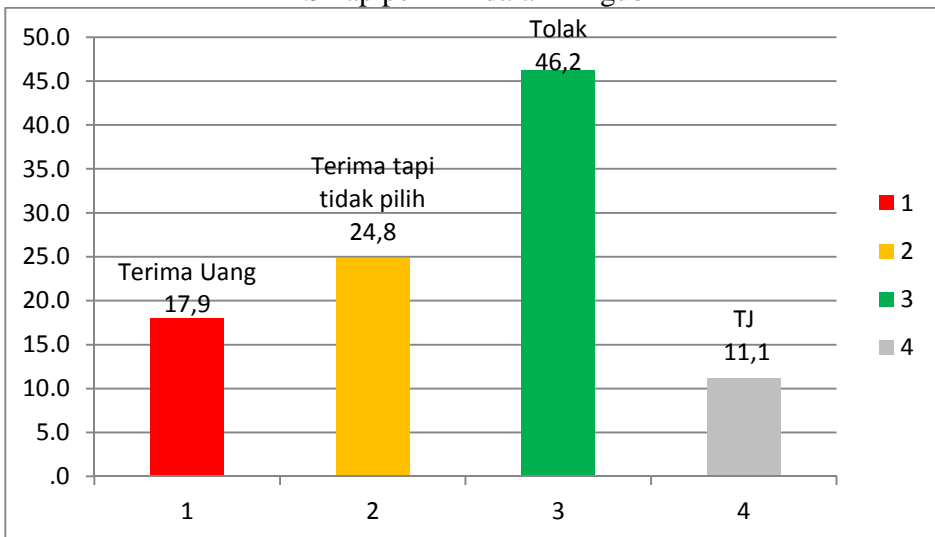
Diagram 6.
Perolehan suara berdasarkan pilihan partai



Sumber: di olah dari hasil survei

Sikap pemilih terhadap politik uang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih menolak uang yang diberikan sebesar 46,2% dan menerima uang yang diberikan tetapi tidak memilih pasangan calon yang bersangkutan sebesar 24,8%. Sedangkan pemilih yang terpengaruh dengan politik uang hanya sebanyak 17,9%.

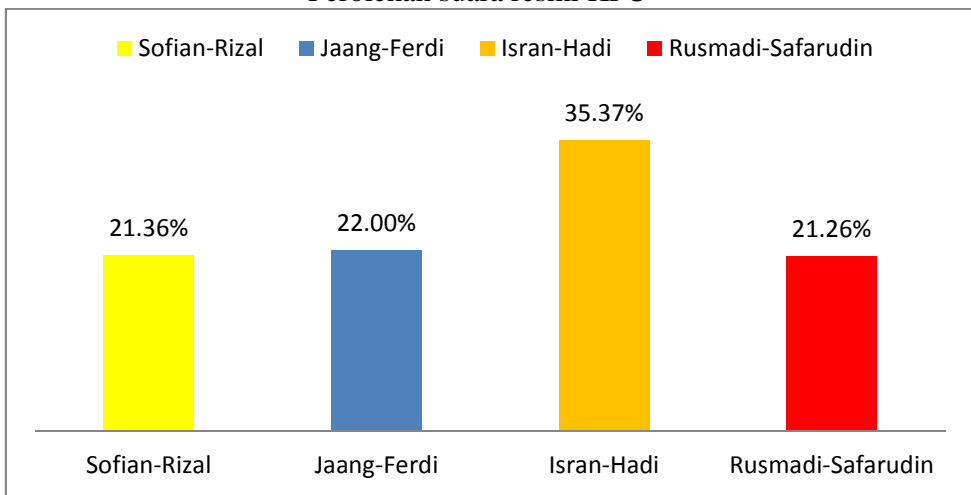
Diagram 7.
Sikap pemilih dalam Pilgub



Sumber: diolah dari hasil survei

Berdasarkan hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor dan Hadi Mulyadi meraih suara terbanyak di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu sebesar 96.045 suara (35,37%), di ikuti pasangan Syaharie Jaang dan Awang Ferdian Hidayat sebesar 59.736 suara (22,00%), pasangan Sofian Hasdam dan Rizal Effendi sebesar 58.007 suara (21,36%) dan pasangan Rusmadi dan Syafaruddin sebesar 57.729 suara (21,26%).

Diagram 9.
Perolehan suara resmi KPU



Sumber: KPUD Kabupaten Kutai Kartanegara

Jika dianalisis dari hasil survei, 94,74 % suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor dan Hadi Mulyadi berasal dari pemilih yang beragama Islam. Penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara mayoritas beragama Islam (91,94%), diikuti oleh Kristen Protestan (6%) dan Katolik (4%). Memang tidak ada calon non muslim pada pemilihan kepala daerah tahun 2018, akan tetapi Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor- Hadi Mulyadi sendiri berhasil meraih suara pemilih muslim lebih besar dari pasangan calon lainnya yaitu sebesar 35,6%.

Demikian juga jika dianalisis berdasarkan latar belakang suku, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi juga berhasil meraih suara pemilih dari suku Kutai sebesar 39,8 %, diikuti oleh suku Jawa, Bugis dan Banjar masing-masing sebesar 33,3%. Penduduk mayoritas di Kabupaten Kutai Kartanegara berasal dari suku

Jawa, di ikuti oleh Kutai, Bugis, Banjar dan Dayak. Baik Isran Noor maupun Hadi Mulyadi sendiri berasal dari suku Kutai sehingga wajar berhasil meraih suara mayoritas dari pemilih yang berasal dari suku Kutai. Hal yang sama juga terjadi pada pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat meraih suara mayoritas pemilih dari suku Dayak sebesar 66,7% karena Syaharie Jaang berasal dari suku Dayak. Dengan demikian pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat sebagai putra daerah berhasil memaksimalkan identitas kesukuan mereka, sehingga berhasil meraih dukungan mayoritas pemilih dari suku masing-masing, sedangkan pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi yang berasal dari suku Bugis dan pasangan Rusmadi-Safaruddin yang berasal dari suku Jawa-Bugis, tidak berhasil memaksimalkan identitas kesukuan mereka.

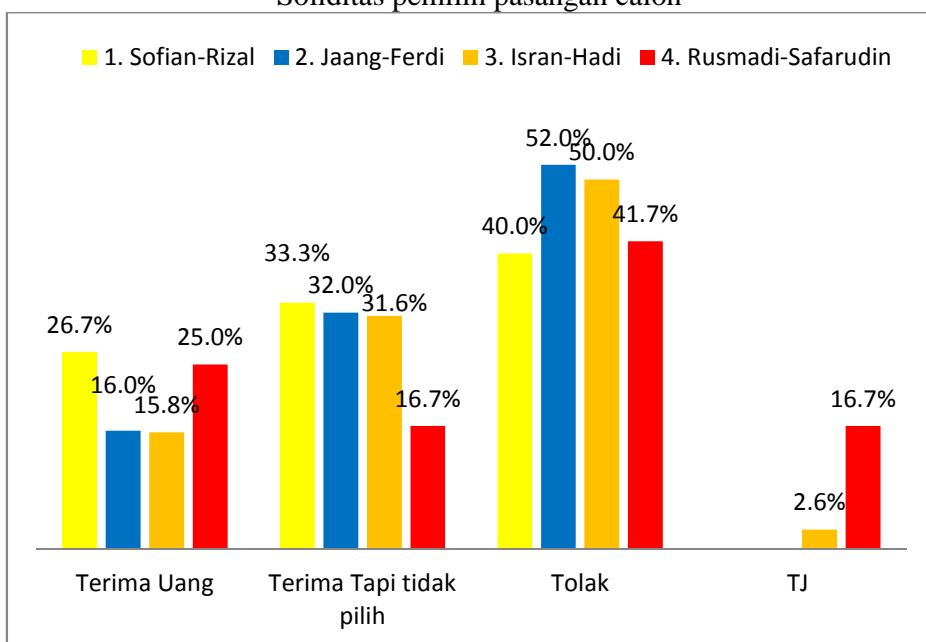
Berdasarkan jenis pekerjaan, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi juga berhasil meraih suara pedagang sebesar 36,1%, karyawan sebesar 45,8%, PNS/ Honoror sebesar 26,7% dan Petani sebesar 16,7%. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, mata pencaharian mayoritas adalah pertanian sebesar 38,25%, industri/kerajinan 18,37%, perdagangan 10,59 % dan lain-lain 32,79%.

Berdasarkan pilihan partai, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi berasal dari pemilih partai Golkar sebesar 44,9%, PAN sebesar 36,7%, Gerindra 42,9 % dan PKS sebesar 50 %. Partai Golkar adalah partai pemenang pemilu pada pemilihan anggota DPRD Propinsi Kaltim daerah pemilihan Kutai Kartanegara tahun 2014 yaitu sebesar 38,83 %, di ikuti oleh PDIP sebesar 12,27%, Gerindra 10,88%, PAN 7,99%, Hanura 6,68%, PKS 6,94%, Demokrat 4,26%, PKB 3,53%, Nasdem 3,38%, PPP 3,14%, PBB 1,45% dan PKPI 0,65%. Bicara dukungan partai, seharusnya pasangan Sofian Hasdam- Rizal Effendi lebih di unggulkan untuk meraih suara terbanyak karena diusung oleh Partai Golkar (38,83%) dan Partai Nasdem (3,38%), di ikuti oleh pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi yang diusung oleh Partai Gerindra (10,88%), PAN (7,99%) dan PKS(6,94%), pasangan Rusmadi-Safaruddin yang diusung oleh PDIP (12,27% dan Partai Hanura (6,68%) dan pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat yang diusung oleh Partai Demokrat (4,26%) PKB (3,53%) dan PPP (3,14%). Tetapi yang terjadi sebaliknya, dimana ada pergeseran suara pemilih partai Golkar ke pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi, hal ini

salah-satunya disebabkan oleh tidak jalannya mesin partai Golkar. Kemenangan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi selain disebabkan oleh ketokohan Isran Noor, juga disebabkan oleh kemampuan mesin partai pengusung dalam bekerja, terutama mesin PKS yang merupakan representasi dari Hadi Mulyadi. Dari sini bisa disimpulkan bahwa tidak ada jaminan pemilih partai akan memilih calon gubernur yang diajukan oleh partai.

Kemenangan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi juga disebabkan oleh soliditas pemilih pasangan tersebut yang tidak terpengaruh oleh politik uang. Pasangan calon Gubernur dengan soliditas pemilih tertinggi adalah Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat dengan 84 %, di ikuti Isran Noor-Hadi Mulyadi 81,6 %, Sofian Hasdam-Rizal Effendi sebesar 73,3% dan pasangan Rusmadi-Safaruddin sebesar 58,4%.

Diagram 10.
Soliditas pemilih pasangan calon

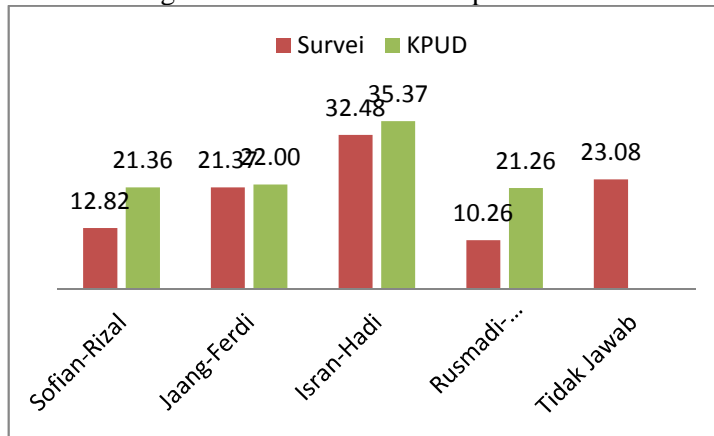


Sumber: diolah dari hasil survei

Jika dibandingkan antara hasil ketetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara dengan hasil Survei sebelumnya, ada kenaikan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi naik sebesar 2,89 % dari hasil survei sebesar 32,48% menjadi 35,37%, pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat naik sebesar

sebesar 0,63% dari sebelumnya 21,37% menjadi 22,00%, pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi naik sebesar 8,54% dari sebelumnya 12,82 % menjadi 21,36% dan pasangan Rusmadi-Safaruddin naik sebesar 11,00% dari sebelumnya 10,26 % menjadi 21,26%. Perubahan persentase perolehan suara ini masih bisa dimaklumi mengingat masih ada 23,08 % pemilih yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan.

Diagram 11.
Perbandingan hasil survei dan penetapan KPUD



Sumber: diolah dari hasil survei dan penetapan KPUD

Pasangan calon calon Gubernur dan Wakil Gubernur Rusmadi-Syafaruddin mengalami kenaikan suara cukup signifikan yaitu sebesar 11 %, di ikuti oleh pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi sebesar 8,54%, Isran Noor-Hadi Mulyadi sebesar 2,89% dan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat sebesar 0,63%. Penyebab kenaikan signifikan pasangan Rusmadi-Syafaruddin dan pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi karena keberhasilan mereka meraih simpati pemilih yang belum menentukan pilihan terutama pada saat debat terakhir di Balikpapan. Selain itu juga disebabkan tidak masuknya wilayah pantai yang merupakan basis pemilih pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi dan pasangan Rusmadi-Safaruddin sebagai wilayah survei. Meskipun demikian, hasil akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kutai Kartanegara sama dengan hasil survei yang menempatkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi sebagai pemenang, diikuti oleh pasangan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat, pasangan Sofian Hasdam-Rizal Effendi dan pasangan Rusmadi-Safaruddin.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

- a. Pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Syaharie Jaang-Awang Ferdian Hidayat sebagai putra daerah berhasil memaksimalkan identitas kesukuan, sehingga berhasil meraih dukungan mayoritas pemilih dari suku masing-masing;
- b. Kemenangan pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi disebabkan oleh kemampuan mesin partai pengusung dalam pemenangan, terutama mesin PKS yang merupakan representasi dari Hadi Mulyadi. Selain itu juga disebabkan oleh soliditas pemilih pasangan tersebut yang tidak terpengaruh oleh politik uang.

5.2. Saran

- a. Meski tidak signifikan, politik identitas tetap diperlukan untuk meraih suara pemilih primordial kedaerahan khususnya bagi calon yang berasal dari putera daerah;
- b. Diperlukan dukungan anggaran agar mesin partai bisa bekerja secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, Afan, 1992, *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under A Hegemonic Party System*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Gaffar, Afan, 2004, *Politik Indonesia;Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mc Closky, Herbert, 1972, *Political Participation. International Encyclopedia of the Social Sciences* (Edisi 2). New York: The Macmillan Company.
- Novianto, Efri, 2017, Perilaku Pemilih dalam Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara Tahun 2015, Tenggarong, Jurnal Mahakam.
- Huntington, Samuel P. dan Nelson, Joan M, 1977, *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*, Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Surbakti, Ramlan, 2010, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo Umbara Citra.
- Soemantri, Sri, 1971, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Bandung, Alumni*.